



PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DI PERPUSTAKAAN: UPAYA MEMBANGUN KEHARMONISAN DALAM KERAGAMAN

***Rohana¹, Nurul Fikriati Ayu Hapsari²**

Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia¹

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia²

Korespondensi: rohana.mip@gmail.com

ABSTRAK

Wacana multikulturalisme menjadi isu krusial dalam mengelola keberagaman keberagaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya di Indonesia, namun kajian terdahulu masih didominasi pada sektor pendidikan formal (sekolah, perguruan tinggi dan kurikulum) tanpa mengkaitkan dengan perpustakaan sebagai ruang publik nonformal yang masih luput dari analisis mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis peran edukatif dan kultural perpustakaan dalam mengimplementasikan pendidikan multikulturalisme guna membangun keharmonisan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Penelitian ini menemukan 14 literatur yang relevan dengan kriteria diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016-2026) yang membahas tentang fungsi perpustakaan (edukatif, kultural, layanan) dengan konsep multikulturalisme, pluralisme, atau inklusi sosial pada artikel ilmiah dan buku teks. Data dianalisis secara operasional menggunakan metode content analysis melalui tahapan kodifikasi data, kategorisasi tema, dan sintesis kritis. Hasil analisis sintesis menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya berperan pasif sebagai penyimpanan informasi, melainkan bertindak strategis sebagai ruang pembelajaran sosial inklusif. Aktualisasi pendidikan multikulturalisme terbukti secara empiris melalui lima pilar: penyediaan koleksi berbasis keberagaman, fasilitasi dialog kebudayaan antar-pemustaka, transformasi layanan inklusi sosial, penyelenggaraan apresiasi budaya lokal, serta penguatan nilai demokrasi dan toleransi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa model konseptual perpustakaan sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*) yang memperluas diskursus sains informasi dalam mendukung terciptanya integrasi masyarakat multikultural yang harmonis.

Kata Kunci: Multikulturalisme; pendidikan multikultural; perpustakaan inklusif; keragaman budaya.

MULTICULTURAL EDUCATION IN LIBRARIES: EFFORTS TO BUILD HARMONY IN DIVERSITY

ABSTRACT

The discourse on multiculturalism has become a crucial issue in managing the diversity of ethnicities, religions, races, languages, and cultures in Indonesia. However, prior studies have predominantly focused on the formal education sector (schools, higher education institutions, and curricula), leaving libraries as non-formal public spaces largely overlooked and lacking in-depth analysis. This study aims to critically analyze the educational and cultural roles of libraries in implementing multicultural education to foster social harmony. A qualitative approach utilizing the library research method was employed. This study identified 14 relevant literatures published within the last decade (2016–2026) that examine library functions (educational, cultural, and services) in relation to the concepts of multiculturalism, pluralism, or social inclusion in scientific articles and textbooks. Data were operationally analyzed using the content analysis method through the stages of data codification, thematic categorization, and critical synthesis. The results of the synthesis indicate that libraries do not merely play a passive role as information repositories; rather, they act strategically as inclusive social learning spaces. The actualization of multicultural education is empirically evidenced through five pillars: the provision of diversity-based collections, the facilitation of intercultural dialogue among patrons, the transformation of social inclusion services, the promotion of local cultural appreciation, and the strengthening of democratic values and tolerance. This study provides a theoretical contribution in the form of a conceptual model of the library as a social change agent, thereby expanding the discourse of information science in supporting the creation of a harmonious, integrated multicultural society.

Keywords: Multiculturalism; multicultural education; inclusive library; cultural diversity.



Copyright©2019

Riwayat Artikel

1. Diterima : 1 September 2025
2. Disetujui : 21 Maret 2026
3. Dipublikasikan : 28 Maret 2026

A. PENDAHULUAN

Belakangan ini istilah multikulturalisme semakin gencar digunakan dalam berbagai diskursus sosial dan akademik. Istilah ini tampaknya telah menggantikan kata pluralisme yang sebelumnya sering digunakan untuk menggambarkan dinamika dan keragaman budaya dalam masyarakat. Secara konseptual, multikulturalisme memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pluralisme. Jika pluralisme umumnya merujuk pada keragaman yang bersifat besar dan tampak secara jelas, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), maka multikulturalisme tidak hanya merujuk pada keragaman besar tersebut, tetapi juga mencakup berbagai ragam budaya yang lebih kecil, termasuk kelompok-kelompok minoritas yang tersebar luas dalam masyarakat (Arikarani et al., 2026; Masduki, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi memiliki karakteristik masyarakat yang multikultural. Negara ini terdiri dari lebih dari 13.000 pulau, sekitar 300 suku bangsa, dan lebih dari 200 bahasa daerah. Selain itu, masyarakat Indonesia menganut enam agama resmi yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu, serta berbagai aliran kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat (Bauto, 2014; Topan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keragaman merupakan realitas sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian penting dari identitas nasional.

Dalam konteks sosiokultural yang kompleks ini, wacana multikulturalisme menjadi isu yang sangat krusial dalam pembangunan kebudayaan di Indonesia. Terdapat tiga alasan utama mengapa pengarusutamaan pendidikan multikulturalisme perlu dikembangkan secara masif di Indonesia (Rifa'i, 2007 dalam Hakim & Darajat, 2023). Pertama, secara kodrati manusia diciptakan dalam keberagaman sehingga pembangunan manusia seutuhnya harus berlandaskan pada pengakuan eksistensial terhadap perbedaan tersebut. Kedua, catatan sejarah menunjukkan bahwa berbagai konflik sosial bernuansa SARA yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan erat dengan persoalan kebudayaan, khususnya akibat lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan budaya dan toleransi. Ketiga, pemahaman tentang multikulturalisme merupakan modal sosial yang mendesak bagi masyarakat untuk menghadapi penetrasi budaya global di era kontemporer. Saat ini, kondisi multikultural merupakan situasi yang tidak dapat dihindari; tingginya mobilitas sosial, arus migrasi, serta ledakan teknologi informasi telah mengikis batas-batas wilayah hingga tidak ada lagi ruang yang benar-benar homogen secara budaya (Salim HS & Suhadi, 2007 dalam Nasution, 2017). Oleh karena itu, diperlukan sebuah jembatan komunikasi yang memungkinkan masyarakat multikulturalisme untuk hidup bersama secara harmonis.

Namun demikian, penelusuran terhadap literatur terdahulu menunjukkan adanya bias institusional yang mendarah daging dalam perumusan dan penerapan pendidikan multikultural. Sejauh ini, mayoritas sarjana dan praktisi secara hegemonik mengurung diskursus pendidikan multikultural dalam dinding-dinding lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan kurikulum berbasis kelas. Sebaliknya, kajian mengenai peran institusi nonformal khususnya perpustakaan dalam mengadopsi dan menyebarkan nilai-nilai multikulturalisme masih sangat marjinal dan luput dari analisis kritis. *Research gap* ini menunjukkan adanya titik buta (*blind spot*) yang signifikan dalam perpustakaan, sains informasi dan pendidikan. Membatasi pendidikan multikultural hanya pada sektor formal merupakan sebuah kekeliruan metodologis, mengingat bias kelas, keterbatasan akses masyarakat umum ke perguruan tinggi, dan sifat pembelajaran sekolah yang cenderung doktriner dan berorientasi pada ujian. Ketika ruang publik formal gagal menjangkau masyarakat secara inklusif, maka diperlukan rekonstruksi konseptual untuk melihat bagaimana ruang publik nonformal dapat mengambil alih peran edukasi sosiokultural tersebut.

Penelitian ini penting karena perpustakaan pada hakikatnya memiliki potensi sosiologis yang besar yang selama ini diabaikan. Perpustakaan menjadi salah satu lembaga yang memberikan penawaran tentang nilai-nilai inklusif melalui pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosioreligius maupun ekonomi. Perpustakaan bukan sekadar gudang buku atau penyimpan informasi yang pasif, seperti tempat meminjam dan membaca buku, melainkan sebuah ruang ketiga (*the third space*) yang demokratis, inklusif, dan bebas diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Manifesto perpustakaan multikultural IFLA dalam Marwiyah (2022) menyebutkan bahwa perpustakaan disediakan untuk melayani berbagai kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat sebagai pusat pembelajaran, budaya dan informasi yang mengacu pada kesetaraan akses informasi serta pengetahuan untuk semua, dalam hal identitas dan nilai-nilai budaya. Sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), perpustakaan memiliki keluwesan yang tidak dimiliki oleh sekolah formal untuk menyelenggarakan pendidikan multikultural berbasis komunitas melalui koleksi sastra yang beragam, program inklusi sosial, dan fasilitasi dialog antar-budaya. Menolak atau mengabaikan peran perpustakaan dalam diskursus ini sama saja dengan mereduksi potensi perpustakaan sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*) yang mampu meredam prasangka sosial (*prejudice*) langsung di tingkat akar rumput.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi celah penelitian di atas, maka fokus utama penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran edukatif dan kultural perpustakaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan

multikulturalisme? dan bagaimana pilar-pilar aktualisasi perpustakaan inklusif dapat berkontribusi dalam membangun keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat?.

Melalui pendekatan kritis, artikel ini berupaya membedah fungsi, layanan, dan aktivitas perpustakaan sebagai ruang pembelajaran sosial yang aktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis baru dalam memperluas cakupan sains informasi, sekaligus memberikan panduan praktis bagi para pustakawan untuk mentransformasi perpustakaan menjadi benteng pertahanan multikulturalisme yang inklusif dan harmonis.

B. KAJIAN TERDAHULU

Wacana multikulturalisme dalam ekosistem perpustakaan telah mengundang perhatian dari berbagai peneliti di tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut tetap perlu dikembangkan guna memperkaya khazanah pengetahuan mengenai peran perpustakaan sebagai sarana pendidikan multikulturalisme di masyarakat. Guna membangun argumentasi ilmiah yang kokoh mengenai posisi penelitian ini, dilakukan telaah kritis terhadap lima penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian pertama oleh Syam (2021) meneliti multikulturalisme di Perpustakaan Umum Kota Medan dengan fokus pada aspek komunikasi antarbudaya antara pustakawan dan pemustaka. Kelebihan penelitian tersebut terletak pada keberhasilannya memotret hambatan psikologis berupa stereotip negatif etnis tertentu dalam proses pelayanan mikro seperti pendekatan interpersonal yang humanis, seperti penggunaan humor untuk mencairkan suasana, menjaga kontak mata, serta memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan latar belakang pengguna. Namun, kelemahan mendasar dari kajian ini adalah pada metodologi pada pendekatan fenomenologi yang berpusat pada pengalaman individu, sehingga luput dalam melihat kebijakan makro institusional perpustakaan sebagai agen perubahan sosial yang terstruktur.

Penelitian kedua dilakukan oleh Akbar dan Asmiyanto (2021) dengan judul *“Multicultural Perspective in Public Library Services”* yang membedah perspektif multikultural dari dimensi pelayanan perpustakaan umum menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai artikel jurnal nasional dan internasional dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Kajian ini berhasil membuktikan pentingnya penyediaan ruang aktivitas bersama (*shared space*) guna mereduksi prasangka antar-kelompok dan kesadaran kolektif pustakawan menjadi faktor penting dalam memberikan layanan multikulturalisme. Kelemahan penelitian ini adalah sifatnya yang murni deskriptif-normatif; hanya menyajikan daftar layanan ideal tanpa memberikan pisau analisis sintesis yang mengaitkan layanan tersebut dengan pilar-pilar teoretis pendidikan multikultural.

Penelitian ketiga oleh Haryanti (2019) mengkaji implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artikel ini secara tajam memaparkan program-program perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pemustaka marjinal melalui melibatkan aktif masyarakat. Namun, kelemahan teoretisnya adalah penelitian tersebut terlalu berfokus pada dimensi *economic empowerment* (pemberdayaan ekonomi), sehingga mengabaikan dimensi kultural dan edukatif perpustakaan dalam mengelola keberagaman identitas, agama, dan etnisitas yang menjadi inti dari diskursus multikulturalisme.

Di kancah internasional, penelitian keempat oleh Oguz (2011) mengeksplorasi penguatan inklusi sosial di masyarakat multikultural melalui program literasi informasi bagi kaum imigran. Kelebihan dari kajian ini adalah keberhasilannya merumuskan kompetensi literasi informasi sebagai instrumen integrasi sosial kelompok minoritas di perpustakaan publik. Namun, terjadi *spatial-gap* (celah ruang) yang signifikan, di mana lokus penelitian tersebut berakar pada pola migrasi transnasional di negara Barat, yang karakternya berbeda secara fundamental dengan realitas multikulturalisme Indonesia yang bersifat indigenus (keberagaman suku/budaya lokal asli yang menetap sejak lama).

Terakhir, penelitian kelima dari Bashir (2020) menganalisis peran perpustakaan publik dalam mempromosikan keragaman budaya dan dialog interkultural di masyarakat digital yang heterogen. Kajian ini memiliki keunggulan dalam memetakan fungsi perpustakaan sebagai mediator budaya. Kelemahannya, analisis mereka didominasi oleh aspek tata kelola manajerial (*top-down management*) dan alokasi anggaran, tanpa menyentuh rekonstruksi konseptual tentang bagaimana program-program tersebut bertransformasi menjadi model pendidikan nonformal yang berkesinambungan.

Penelitian dalam mengisi kesenjangan teori yang tidak hanya melihat perpustakaan aspek komunikasi, ekonomi atau layanan saja, tetapi secara khusus mengkaji perpustakaan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan multikulturalisme melalui berbagai fungsi edukatif dan kulturalnya. Perpustakaan dapat menjadi satu kesatuan ekosistem ruang ketiga (*third space*) sesuai dengan Teori Ruang Ketiga yang dikembangkan oleh Ray Oldenburg dan diperluas oleh Homi Bhabha. Prinsip dasar Ruang Ketiga dalam perpustakaan menghendaki adanya penyetaraan pada semua individu dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) memiliki hak akses yang setara tanpa sekat birokratis atau diskriminasi kultural. Perpustakaan sebagai Ruang Ketiga berfungsi sebagai zona netral (*neutral ground*) yang memfasilitasi interaksi sosial sukarela, sehingga potensi gesekan sosial akibat prasangka dapat direduksi melalui perjumpaan budaya yang intens.

Implementasi pendidikan multikultural di perpustakaan mengadopsi taksonomi teoretis dari James Banks (2010), yang memandang pendidikan multikultural bukan sekadar kurikulum

formal, melainkan sebuah ideologi penyeteraan. Teori ini menyediakan kerangka kerja melalui empat prinsip dasar yang diadaptasi ke dalam ekosistem perpustakaan, terdiri dari 1) Integrasi konten yang merepresentasikan beragam perspektif kelompok budaya dan etnis secara adil; 2) Proses konstruksi pengetahuan di perpustakaan membantu pemustaka memahami bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh posisi kultural; 3) Reduksi prasangka, fokus pada penggunaan program perpustakaan (seperti dialog budaya dan apresiasi lokal) untuk mengubah sikap pemustaka agar lebih toleran terhadap perbedaan; 4) Pemberdayaan budaya institusi dengan melakukan rekonstruksi tata kelola perpustakaan dan kompetensi antarbudaya pustakawan agar menciptakan iklim yang merayakan keberagaman.

Dalam mengatasi pendidikan multikultural perpustakaan perlu melakukan pendekatan inklusi sosial. Menurut International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) dan diperkuat oleh Haryanti (2019), inklusi sosial di perpustakaan bergeser dari sekadar menyediakan akses fisik (*equality of access*) menuju pemberdayaan partisipatif (*equality of outcomes*). Perpustakaan dengan akses inklusif dapat memfasilitasi dialog dari berbagai karakter multikultural sehingga tercipta pemberdayaan.

Ketiga landasan teoretis di atas disatukan menjadi sebuah alat analisis (*analytical framework*) untuk membedah data literatur yang dikaji. Teori Ruang Ketiga digunakan untuk menguji netralitas fisik dan atmosfer perpustakaan; Dimensi Pendidikan Multikultural oleh James Banks digunakan untuk membedah muatan edukasi multikultural dalam koleksi dan program perpustakaan; sedangkan Paradigma Inklusi Sosial digunakan untuk mengukur dampak nyata layanan perpustakaan dalam melahirkan keharmonisan sosial di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Perpustakaan sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*) yang secara operasional mampu merawat keharmonisan di tengah kompleksitas keberagaman Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran sosial yang berperan aktif dalam membangun keharmonisan dalam masyarakat yang beragam.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review* atau *library research*). Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis draf-draf pemikiran ilmiah guna membangun model konseptual mengenai pendidikan multikulturalisme di perpustakaan. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui penentuan kriteria seleksi literatur, pengumpulan sumber data, dan analisis isi secara operasional.

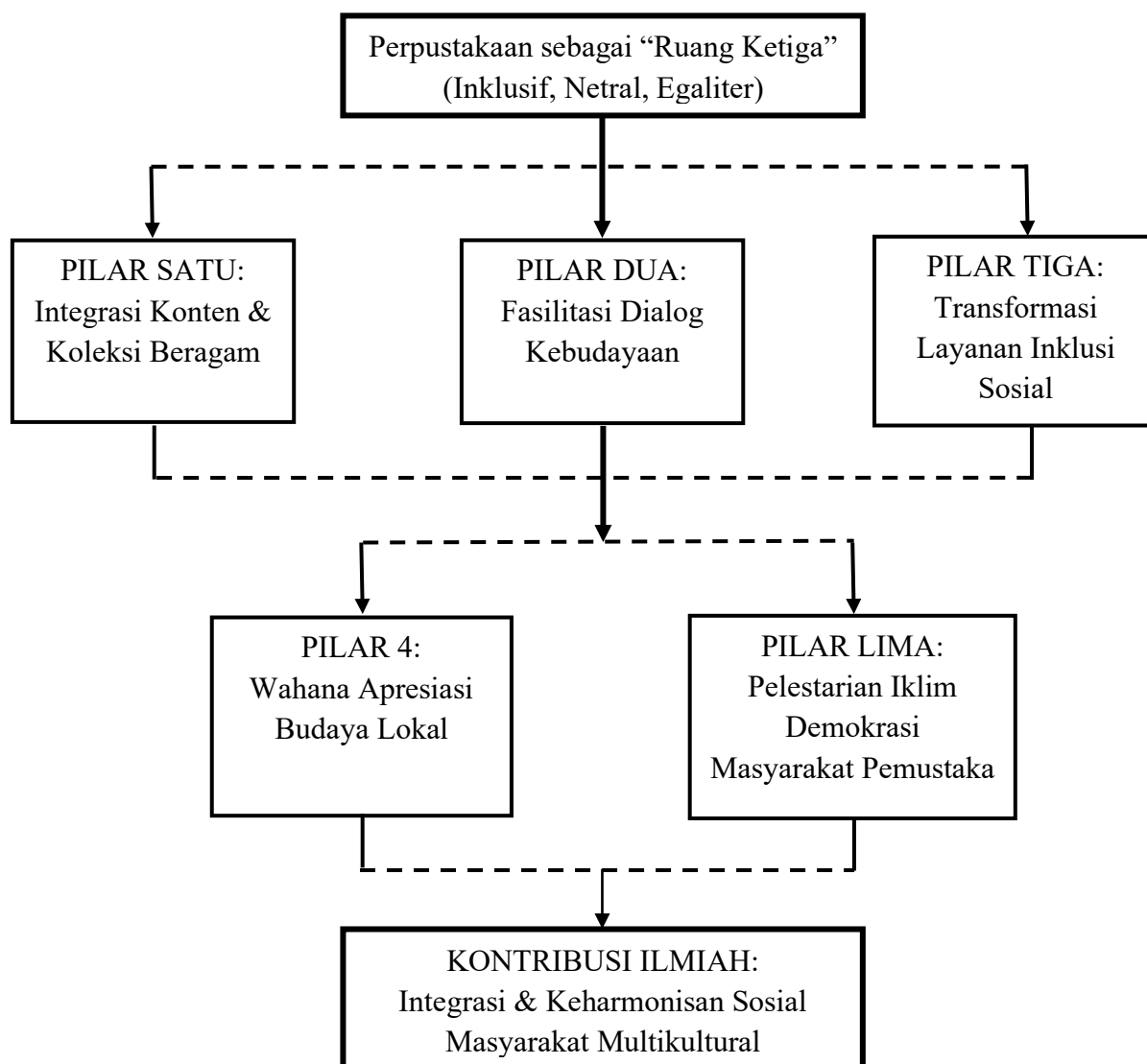
Kriteria inklusi literatur yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada artikel ilmiah dari jurnal nasional dan jurnal internasional serta buku teks, yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir agar data yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan kajian terkini. Fokus substansi membahas keterkaitan antara fungsi perpustakaan (layanan, koleksi, fungsi edukatif/kultural) dengan konsep multikulturalisme atau inklusi sosial. Sedangkan kriteria literatur eksklusif yang membahas pendidikan multikultural hanya terbatas pada lingkup lembaga pendidikan formal (sekolah/kurikulum kelas) tanpa mengaitkannya dengan peran lembaga perpustakaan dan artikel populer, opini media massa, makalah pendek, atau blog personal non-ilmiah yang tidak melalui proses *peer-review*. Berdasarkan kriteria di atas ditemukan 14 literatur yang dinilai representatif untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analysis (analisis isi), yaitu teknik analisis yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam berbagai dokumen atau sumber tertulis secara sistematis. Prosedur analisis dijalankan secara operasional melalui empat tahapan, terdiri dari: 1) Tahap Kondensasi dan Kodifikasi Data (*Data Coding*), seluruh teks dari 14 literatur dibaca secara menyeluruh dan peneliti melakukan pemadatan data (*data condensation*) dengan mengisolasi unit analisis berupa kalimat, paragraf, atau frasa penting yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Selanjutnya, dilakukan pemberian kode (*coding*) berbasis kode induktif dan deduktif; 2) Tahap Kategorisasi Tema, kode-kode yang sejenis dikelompokkan dan diabstraksikan ke dalam kategori tema yang lebih besar. Tahap ini bertujuan untuk menstrukturkan data mentah menjadi pilar-pilar konseptual. Dari proses ini, berhasil dipetakan 5 Kategori Utama aktualisasi pendidikan multikultural di perpustakaan, yaitu: (a) Pusat Pengenalan Multikulturalisme, (b) Dialog Kebudayaan, (c) Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, (d) Wahana Apresiasi Budaya, dan (e) Pelestarian Nilai Demokrasi; 3) Tahap Sintesis Kritis, peneliti melakukan analisis silang (*cross-analysis*) dengan membandingkan, mempertentangkan, dan menyatukan temuan antar-literatur secara kritis; 4) Tahap Penarikan Kesimpulan Induktif, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis yang telah dilakukan. Hubungan antar-kategori diintegrasikan untuk melahirkan sebuah kebaruan (*novelty*) berupa model konseptual abstrak yang utuh, yaitu "*Model Konseptual Lima Pilar Pendidikan Multikultural Berbasis Perpustakaan*".

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis isi (*content analysis*) terhadap 14 literatur yang dieksplorasi menghasilkan sebuah temuan makro, yaitu perpustakaan di Indonesia tidak lagi sekadar tempat penyimpanan informasi fisik (*information repository*), melainkan sebuah institusi dinamis yang berfungsi sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*). Dari hasil kodifikasi dan kategorisasi data literatur, dirumuskan sebuah kebaruan ilmiah (*novelty*) berupa Model Konseptual Lima Pilar Pendidikan Multikultural Berbasis Perpustakaan.

Model ini mengintegrasikan *Third Space Theory* dan kerangka kerja James Banks ke dalam sebuah ekosistem yang utuh.



Gambar 1. Model Konseptual Lima Pilar Pendidikan Multikultural Berbasis Perpustakaan

1. Pilar satu: Integrasi Konten dan Koleksi Beragam

Perpustakaan sebagaimana yang dipaparkan oleh Ggreenhalgh dan Worpole (1995) seperti dikutip Rifa'i merupakan suatu gerbang bagi kebudayaan secara luas (*an entry point to the wider culture*). Jika perpustakaan merupakan gerbang kebudayaan, maka perpustakaan

seharusnya merupakan tempat yang bebas noda atau netral dari keberpihakan. Perpustakaan seharusnya menjadi tempat beragam kebudayaan manusia di mana seseorang dapat mengenal dan memahami ragam budaya yang dimiliki oleh manusia (Rifa'i, 2021). Sejalan dengan pernyataan Greenhalgh tersebut, perpustakaan memang memiliki fungsi dalam pelestarian khazanah budaya umat manusia. Sejak kelahiran hingga perkembangannya, perpustakaan menjadi tempat penyimpanan koleksi (khazanah budaya) yang merupakan hasil karya intelektual manusia, baik tercetak ataupun non cetak atau elektronik.

Tersedianya koleksi yang beragam jenis dan subjeknya merupakan gambaran bahwa perpustakaan mengimplementasikan fungsinya sebagai sarana pendidikan multikulturalisme. Manifestasi paling mendasar dari pendidikan multikultural di Perpustakaan dimulai dari kebijakan pengadaan koleksi. Pendidikan multikultural digunakan untuk membedah bagaimana sebuah informasi atau koleksi tidak bias terhadap satu kelompok (Banks, 2010). Di dalam koleksi beragam yang disediakan oleh perpustakaan, masyarakat dapat mengenal dan belajar budaya dari berbagai daerah bahkan negara luar. Banyak perpustakaan menyediakan koleksi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, maupun dari berbagai negara terutama perpustakaan umum dan perguruan tinggi melalui kegiatan kerjasama. Data dari literatur membuktikan perkembangan pengadaan koleksi di Indonesia telah bergeser dari sentralisasi berbasis narasi tunggal menuju pembentukan *corner-corner* representatif, di mana perpustakaan kini mulai menyediakan pojok-pojok khusus berbasis identitas atau budaya tertentu, seperti *BI corner*, *Kids corner*, *Muhammadiyah corner*, *Iranian corner*, *Indian corner*. Pengadaan *corner* spesifik ini tidak lagi dilihat sebagai sekadar sebagai penyediaan buku tambahan, melainkan sebuah proses rekonstruksi pengetahuan untuk mengenalkan keberagaman.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2021) yang memandang penyediaan koleksi sebagai pemenuhan kebutuhan informasi standar, hasil analisis ini menunjukkan bahwa penyediaan koleksi multidisiplin dan multietnis merupakan bentuk rekonstruksi pengetahuan. Ketika perpustakaan daerah menyediakan literatur budaya lokal secara seimbang dengan buku modern, perpustakaan sedang mengurangi budaya dominan agar ruang publik yaitu perpustakaan menjadi adil bagi semua keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, pengadaan koleksi multikultural sering kali terhambat oleh ideologi pengelola perpustakaan yang belum memiliki kesadaran multikultural.

2. Pilar Dua: Fasilitasi Dialog Kebudayaan

Hal penting dari pendidikan multikulturalisme adalah dialog kebudayaan sebagai tameng agar konflik yang dilatarbelakangi perbedaan budaya tidak terjadi atau minimal berkurang. Analisis data literatur mengonfirmasi bahwa perpustakaan menyediakan ruang

interaksi lintas kultural yang efektif. Dialog kebudayaan terjadi pada tiga level operasional: interaksi pustakawan-pemustaka, pemustaka-pemustaka, dan pustakawan-pustakawan. Dialog kebudayaan di perpustakaan dapat terjadi melalui berbagai cara antara lain. Pertama, penyediaan dan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi. Inklusi artinya terbuka untuk semua masyarakat pemustaka tanpa memandang latar belakang budaya, suku, bahasa maupun agama. Selain itu perpustakaan juga dapat melibatkan pemustaka dalam kegiatan atau program perpustakaan seperti pelibatan dalam pelatihan, relawan perpustakaan, diskusi, seminar, workshop atau kegiatan lain sehingga pemustaka merasa dihargai dan dihormati serta diberdayakan.

Penelitian Syam (2021) di Perpustakaan Umum Kota Medan menemukan adanya hambatan komunikasi antarbudaya yang dipicu oleh stereotip negatif terhadap etnis minoritas (Tionghoa), yang berpotensi melahirkan tindakan diskriminatif dalam pelayanan. Namun hambatan stereotip tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan interpersonal-humanis (seperti penggunaan humor atau kontak mata), melainkan harus diintervensi melalui kebijakan institusional terstruktur. Perpustakaan harus mendesain program-program kolaboratif (misalnya forum diskusi inklusif) yang memaksa terjadinya *contact hypothesis*—di mana permusuhan antar kelompok yang berbeda dapat dikurangi dengan cara saling berinteraksi secara langsung dalam status setara. Perpustakaan harus menjadi wadah struktural yang sengaja menciptakan ruang pertemuan inklusif. Dengan membuat program kolaboratif (seperti diskusi atau kegiatan budaya), perpustakaan memaksa orang-orang dari latar belakang SARA yang berbeda untuk berinteraksi dalam status yang setara. Interaksi intens inilah yang secara psikologis akan mengikis bias kognitif dan meruntuhkan stereotip negatif di antara kelompok.

3. Pilar Tiga: Transformasi Layanan Inklusi Sosial

Salah satu hal menarik dari perpustakaan adalah sifatnya yang netral dan terbuka terhadap berbagai latar belakang budaya, terlebih dalam era teknologi informasi yang semakin canggih dan terbuka. Perpustakaan mengelola informasi tanpa terikat oleh budaya, agama, suku, dan bangsa. Siapapun boleh mengakses informasi di perpustakaan dan perpustakaan bersifat netral terhadap perbedaan.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya. Pendekatan inklusi sosial untuk mendorong semua lapisan elemen untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Inklusi sosial mengacu pada semua upaya dan kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan kesempatan kepada masyarakat dari semua keadaan dan semua kategori yang dikecualikan secara sosial.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat diterapkan melalui transformasi perpustakaan seperti mengajak pemustaka atau masyarakat untuk memanfaatkan koleksi yang beragam, memanfaatkan koleksi untuk menunjang kesejahteraan (Haryanti, 2019), melaksanakan program pelatihan yang meningkatkan kreatifitas masyarakat pemustaka, dan kegiatan lain yang dibutuhkan pemustaka.

Penelitian Haryanti (2019) mengenai perpustakaan berbasis inklusi sosial memperlihatkan bahwa perpustakaan telah bertransformasi menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang melepaskan sekat SARA. Namun dalam penelitian yang dilakukan Haryanti inklusi sosial di perpustakaan terlalu didominasi oleh bias ekonomi (*economic-driven approach*), seperti pelatihan keterampilan untuk kesejahteraan finansial. Inklusi sosial di perpustakaan tidak akan mencapai hasil yang berkelanjutan jika tidak diintegrasikan dengan inklusi budaya (*cultural inclusion*). Membuka akses masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka tanpa membangun atmosfer yang menghargai identitas kultural akan melahirkan asimilasi paksa. Jika perpustakaan hanya mengundang masyarakat marjinal/suku asli untuk datang, lalu memberikan pelatihan ekonomi (misalnya cara bertani modern atau berbisnis), tetapi di sisi lain perpustakaan mengabaikan atau melarang identitas, bahasa, dan tradisi lokal mereka berkembang. Akibatnya, masyarakat asli tersebut mungkin akan sejahtera secara ekonomi, namun mereka kehilangan akar budaya aslinya karena "melebur" ke dalam standar budaya modern/mayoritas yang dibawa oleh perpustakaan.

Dapat disimpulkan bahwa layanan inklusi sosial di perpustakaan harus berjalan beriringan dengan inklusi budaya. Perpustakaan harus meningkatkan ekonomi masyarakat *sekaligus* menyediakan ruang bagi mereka untuk tetap merawat dan bangga terhadap tradisi asli daerahnya (seperti tradisi *nyaer* atau *pembayun* di Lombok).

4. Pilar Empat: Wahana Apresiasi Budaya Lokal

Apresiasi terhadap budaya yang beragam merupakan pendidikan multikulturalisme yang dapat juga diimplementasikan di perpustakaan. Data empiris dari beberapa literatur menunjukkan keberhasilan perpustakaan, seperti ketersediaan literatur yang multidisiplin, layanan yang bersifat inklusi, dan program perpustakaan seperti pameran budaya dan kesenian, pameran lukisan, lomba pidato, bedah buku budaya, bazar makanan daerah, adalah bentuk apresiasi terhadap budaya. Perpustakaan sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana simpan karya manusia, pusat informasi, pendidikan, dan rekreasi semata, tetapi juga sebagai tempat menumbuhkan budaya dan tradisi lokal masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari program perpustakaan yang berbasis tradisi lokal, di mana program lebih menekankan pada pelibatan masyarakat. Salah satu contoh dari pelibatan masyarakat adalah pelatihan membaca hikayat (*nyaer*) yang dilakukan oleh perpustakaan desa Semparu Lombok Tengah, pelatihan

pembayun oleh perpustakaan desa Jago, Lombok Tengah, bercerita pada anak-anak oleh perpustakaan Literasi Lumbung Lombok Sengkerang Lombok Tengah, dan perpustakaan Kartini desa Pagutan yang mengusung program membumikan perpustakaan dengan menyediakan buku-buku bacaan yang banyak bertemakan budaya. Apresiasi ini sangat penting karena multikulturalisme menekankan pada penghormatan dan penerimaan terhadap budaya yang beragam.

Kajian terdahulu dari luar negeri, seperti Oguz (2011), memandang program multikultural di perpustakaan sebagai alat bantu asimilasi dan literasi informasi bagi kaum imigran eksternal. Peneliti melakukan kontekstualisasi kritis bahwa di Indonesia, polanya bersifat *indigenous multiculturalism*. Artinya, keragaman yang dihadapi bukanlah pendatang baru dari luar negara, melainkan suku-suku asli yang telah lama menetap namun mengalami marginalisasi kultural. Aktivitas seperti *nyaer* dan *pembayun* di perpustakaan desa bukan sekadar hiburan rekreasi (mengoreksi teori Sulistyio-Basuki, 1991), melainkan tindakan politik kebudayaan untuk mengapresiasi identitas lokal agar tidak tergilas oleh arus globalisasi.

5. Pilar Lima: Pelestarian Iklim Demokrasi Masyarakat Pemustaka

Demokrasi dimaknai sebagai persamaan hak bagi masyarakat (Makmun, 2019). Dalam konteks ini adalah ini adalah warga perpustakaan atau pemustaka. Perpustakaan memiliki tanggungjawab dalam melestarikan demokrasi melalui koleksi yang dikelola dan disediakan dengan beragam dan tanpa mengandung propaganda-propaganda yang memihak salah satu golongan. Layanan yang bersifat inklusi juga menjadi sarana dalam menumbuhkan demokrasi di kalangan pemustaka. Makmun (2019) menegaskan bahwa perpustakaan bertanggung jawab memelihara iklim demokrasi. Hal ini dicapai melalui netralitas informasi yang disajikan.

Analisis literatur menunjukkan bahwa perpustakaan bertindak sebagai *leveller* (penyetara). Di ruang perpustakaan, tidak ada stratifikasi sosial berdasarkan kelas ekonomi, agama, atau etnisitas. Ketika perpustakaan menolak menyediakan koleksi yang mengandung propaganda sepihak dan membuka ruang baca yang setara bagi semua golongan, perpustakaan sedang mengimplementasikan nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi fondasi utama pendidikan multikultural.

Melalui sintesis komparatif di atas, penelitian ini mematahkan asumsi normatif lama yang menganggap pendidikan multikultural hanya terjadi di dalam ruang kelas formal melalui transmisi guru ke siswa. Argumentasi baru yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa perpustakaan bertindak sebagai "Ruang Ketiga" (*Third Space*) yang menjalankan fungsi multikultural tanpa paksaan. Jika sekolah formal mengajarkan multikulturalisme secara teoretis-kognitif, perpustakaan mengaktualisasikannya secara praktis-behavioral melalui desain

lingkungan yang inklusif, pengadaan koleksi yang demokratis, dan program pelibatan masyarakat yang menghidupkan tradisi indigenous. Dengan demikian, kontribusi ilmiah dari artikel ini adalah reposisi teoretis terhadap Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi (IPSI): dari ilmu yang berpusat pada pengelolaan dokumen (*document-centric*) menjadi ilmu yang berpusat pada harmoni dan integrasi sosial kemasyarakatan (*society-centric*).

E. KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini membuktikan bahwa perpustakaan di Indonesia bukan lagi sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang publik yang aktif mengubah masyarakat menjadi lebih harmonis. Keharmonisan dalam keragaman ini berhasil diwujudkan melalui Model Lima Pilar, yaitu: menyediakan buku dari berbagai sudut pandang kebudayaan, membuka ruang diskusi untuk menghapus prasangka antar-suku/agama, menyelenggarakan pelatihan yang menghargai tradisi lokal agar masyarakat tidak kehilangan identitas aslinya, melestarikan kesenian daerah, serta menjamin hak yang sama bagi setiap pengunjung tanpa memandang status sosial. Dampak teoretis dari temuan ini berhasil mengubah cara pandang ilmu perpustakaan, dari yang dulunya hanya fokus pada cara mengelola dokumen, kini bergeser fokusnya menjadi ilmu yang membangun keharmonisan masyarakat. Secara praktis, model lima pilar ini dapat langsung digunakan oleh para pustakawan sebagai panduan nyata untuk merancang program kerja dan layanan perpustakaan yang ramah serta merayakan keberagaman di lingkungan sekitar.

Namun, karena penelitian ini baru sebatas kajian teori dan konsep, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menguji dan mempraktikkan langsung Model Lima Pilar ini di lapangan. Peneliti lain disarankan melakukan studi kasus di berbagai perpustakaan daerah atau perpustakaan desa yang memiliki tingkat keragaman masyarakat yang tinggi, serta mengukur secara nyata seberapa besar program perpustakaan tersebut mampu meningkatkan rasa toleransi dan menurunkan konflik sosial di tingkat masyarakat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikarani, Y., et al., (2026). Pluralisme dan Pendidikan Agama Islam Multikultural. *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 217–232. doi: 10.37092/ej.v8i2.1258
- Akbar, S. A. & Asmiyanto, T. (2021). Multicultural Perspective in Public Library Services. *Library Philosophy and Practice* (e-journal). 5291.
- Azzuhri, M. (2012). Konsep multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan agama (Upaya menguniversalkan pendidikan agama dalam ranah keindonesiaan). *Forum Tarbiyah*, 10(1), 13-29.
- Banks, J. A. (2010). *Multicultural education: Issues and perspectives*. John Wiley & Sons.
- Bashir, F. (2020). Ambassador of Lifelong Learning/ Public Libraries in Multicultural Society: The Case of Pakistan. *Türk Kütüphaneciliği*, 34 (3), 548-558. doi: 10.24146/tk.772189
- Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11–25. doi: 10.17509/jpis.v23i2.1616
- Hakim, A. R., & Darojat, J. (2023). Pendidikan multikultural dalam membentuk karakter dan Identitas Nasional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(3), 1337–1346. doi: 10.29303/jipp.v8i3.1470
- Haryanti, W. T. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 2(3).
- Hasanuddin, H. (2024). Konsep kebijakan dan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. *Educasia*, 9(1), 31-43.
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2015). *IFLA multicultural library manifesto*. IFLA.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Makmun, R. (2016). *Pendidikan multikultural di SMK Negeri 1 Kabupaten Madiun: Studi penanaman nilai-nilai multikultural pada vokasi dan pendidikan agama Islam*. STAIN Po Press.
- Mania, S. (2010). Implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran. *Lentera Pendidikan*, 13(1), 78-91.
- Marwiyah. (2022). *Perpustakaan dan Inclusivity: Implementasi Tujuan Nomor 10 Sustainable Development Goals (SDGs), Reduced Inequality*. In *Jejak Sang Guru: Bunga Rampai Kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi* (93–130). ABC Publishing.
- Masduki, H. (2016). Pluralisme Dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (Telaah Dan Urgensinya Dalam Sistem Berbangsa Dan Bernegara). *DIMENSI- Journal of Sociology*, 9(1). doi: 10.21107/djs.v9i1.3741

- Nasution, R. D. (2017). Effect of the Development of Communication Information Technology on Local Cultural Existence-Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 123858.
- Rifa'i, A. (2007). Perpustakaan dan multikulturalisme: Implementasi pendidikan multikulturalisme di perpustakaan. *Al-Maktabah*, 9(1).
- Salim, H. S., & Suhadi. (2007). *Membangun pluralisme dari bawah*. LKiS.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyo-Basuki. (1991). *Pengantar ilmu perpustakaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syam, A. M. (2021). *Multikulturalisme di perpustakaan umum Kota Medan: Ditinjau dari aspek komunikasi antarbudaya pustakawan dan pengguna* (Laporan penelitian).
- The New Encyclopaedia Britannica. (1974). *The New Encyclopaedia Britannica* (Vol. 10). Encyclopaedia Britannica Inc.
- Topan, A. (2026). *ISLAM MODERAT: Sejarah, Tantangan dan Praktik*. PENERBIT KBM INDONESIA.